

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap pengaruh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ( $X_1$ ), kelemahan sistem pengendalian intern ( $X_2$ ) dan jumlah organisasi perangkat daerah ( $X_3$ ) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan uji t, variabel bebas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan memiliki pengaruh. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin banyak temuan akan mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan lebih.
2. Berdasarkan uji t, untuk variabel bebas kelemahan sistem pengendalian intern terhadap variabel terikat tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak memiliki pengaruh. Hal tersebut dikarenakan jumlah temuan atas sistem pengendalian intern dianggap tidak material sehingga pemerintah sebagai *steward* tidak perlu melakukan pengungkapan lebih atas temuan tersebut dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Berdasarkan uji t, variabel jumlah organisasi perangkat daerah tidak berpengaruh terhadap variabel terikat tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan setiap organisasi perangkat daerah memiliki kegiatan yang sama sehingga banyak atau sedikitnya jumlah OPD pada suatu daerah tidak mempengaruhi tinggi atau rendahnya pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Berdasarkan uji F, variabel ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, variabel kelemahan sistem pengendalian intern dan variabel jumlah organisasi perangkat daerah tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Artinya, jumlah temuan atas ketidakpatuhan perundang-undangan, jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan jumlah organisasi perangkat daerah secara bersama-sama tidak dapat mempengaruhi tingkat

pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka ada beberapa hal yang disarankan terkait dalam penelitian antara lain:

1. Berdasarkan hasil uji diketahui rata-rata pengungkapan pemerintah daerah di Sumatera Selatan sebesar 49,77%. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi terhadap laporan keuangannya terutama melalui pengungkapan wajib berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar menambah luas wilayah penelitian, yakni menjadi pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera atau se-Indonesia agar mendapatkan hasil yang lebih akurat mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun berikutnya sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan hasil yang terbaru.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lain yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan seperti rekomendasi tindaklanjut hasil audit BPK.